



Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pacitan

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025



# 2025

---

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja utamanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pacitan, - 1 - 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670716 199202 1 002



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menyelaraskan dengan dinamika dan perubahan di lingkungan eksternal dan internal di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan, maka telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan memiliki peran dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka dicetuskan tujuan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu ***“Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel”***.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja :
  - Score Nilai LPPD
  - Score Nilai Tata Kelola PBJ
2. Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah dengan indikator kinerja :
  - Score Nilai SAKIP PD
  - Score Nilai IKM PD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan 3 (tiga) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Dari hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan sebesar 95,35% yang dalam skala ordinal termasuk kategori "SANGAT MEMUASKAN".

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mengalokasikan dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 33.755.180.503,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp31.233.098.826,34 atau 92,53 %.

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Namun dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul sehingga capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	II
<u>DAFTAR ISI</u> .....	IV
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	6
D. ISU STRATEGIS.....	7
E. CASCADING KINERJA.....	9
F. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.	11
G. RINGKASAN HASIL EVALUASI .....	17
H. DASAR HUKUM.....	18
I. SISTEMATIKA .....	20
BAB II.....	22
PERENCANAAN KINERJA .....	22
A. KETERKAITAN MISI RPJMD, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	22
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025 .....	26
BAB III .....	29
AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	31
B. REALISASI ANGGARAN .....	80
C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BERDASAR RENCANA AKSI TAHUN 2025.....	84
D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH.....	103
BAB IV .....	105
PENUTUP.....	105
LAMPIRAN .....	

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip Good Governance mengharuskan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

---

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan.

Kinerja (*performance*) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja. *Rue & Byars* (1991) mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil, hal ini berarti kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Bagi setiap organisasi, pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi oleh para *stakeholder*. Diketuinya tingkat kegagalan dan keberhasilan itu akan mendorong Instansi Pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dan pelayanan publik. Efektifitas pengukuran kinerja akan menjadi kenyataan, jika dapat dirumuskan dan ditetapkan indikator kinerja yang bisa menggambarkan tingkat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja.

Diketahui bersama bahwa dalam kerangka pembangunan *good governance*, penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Oleh karena itu dalam penggunaan anggaran Negara baik pusat maupun daerah harus didasarkan pada anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang

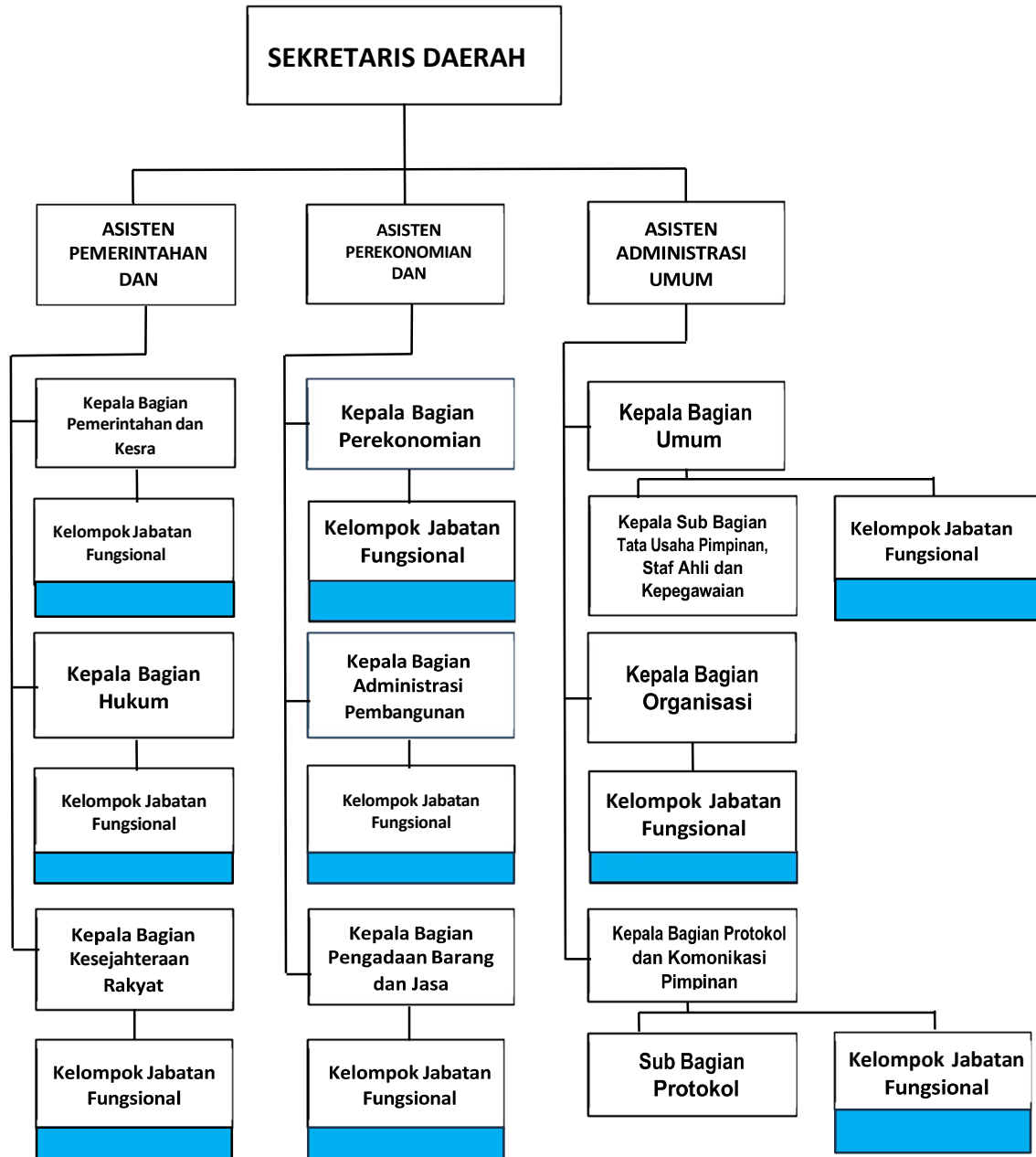
diinginkan masyarakat. Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik *output* maupun *outcome*.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya, struktur organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan





Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan, terdiri dari: 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah terkait pemerintahan dan kerjasama, hukum, serta kesejahteraan rakyat dan membawahi : Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah terkait perekonomian, pembangunan, serta layanan pengadaan barang dan jasa dan membawahi : Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, 3) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah terkait pelayanan administrasi umum, organisasi, serta protokol dan komunikasi pimpinan, yang membawahi : Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

### C. TUGAS DAN FUNGSI

Organisasi merupakan sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dimana organisasi sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan dan sistem sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

1. SEKRETARIS DAERAH
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  - a. Bagian Pemerintahan

- 
- b. Bagian Hukum
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- a. Bagian Perekonomian
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan
  - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- a. Bagian Umum
  - b. Bagian Organisasi
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### **D. ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal

berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

Di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
- 2) Masih adanya perbedaan persepsi tentang adanya overlapping tugas dan fungsi antara Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dengan Perangkat Daerah (Dinas/lembaga teknis).
- 3) Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
- 4) Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 5) Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.
- 6) Kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan kondisi/keadaan terkini.

## E. CASCADING KINERJA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergita (aligment).

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 4 : **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani** Pada misi keempat ini, yang menjadi tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan berperan dalam beberpa sasaran dan mempunyai tugas pokok sebagai penyusun kebijakan dan pengkoordinasian Perangkat Daerah.

Dari misi ke 4 tersebut maka disusun tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu “*Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel*” dan diimplementasikan dalam cascading sebagai berikut :

Tabel I.2  
Cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan

**CASCADING SEKRETARIAT DAERAH**

<b>Tujuan</b>	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel											
<b>Indikator Tujuan</b>	Nilai SAKIP Daerah						Nilai IKM Daerah					
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan						Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah					
<b>Indikator Sasaran</b>	Nilai LPPD			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			Score Nilai Sakip PD			Nilai IKM PD		
<b>Program</b>	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Program Perekonomian dan Pembangunan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota					
<b>Indikator Program</b>	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana.	% kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	% tata kelola keuangan yang terlaksana	% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	Nilai IKM PD

## **F. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

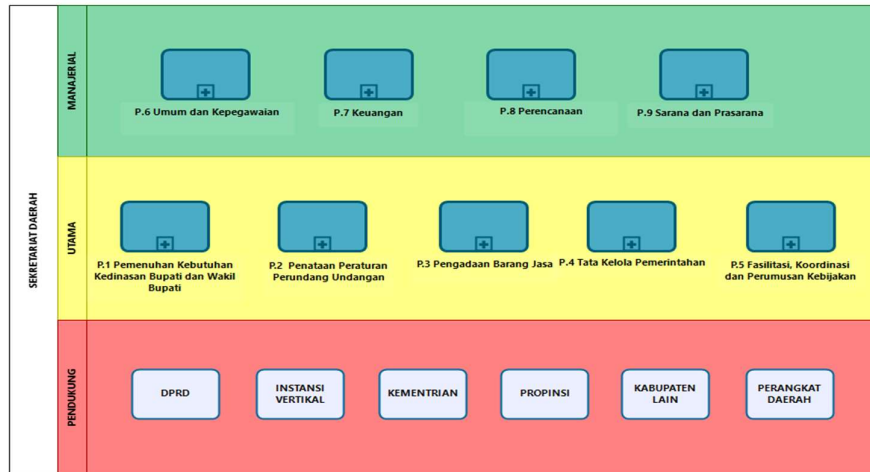
Peta proses bisnis adalah serangkaian aktivitas kerja terstruktur yang menggambarkan keterkaitan antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya yang menghasilkan keluaran aktivitas sesuai dengan kebutuhan pengguna atau penerima layanan. Peta ini merupakan turunan dari visi, misi, dan tujuan dari setiap instansi baik kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah agar instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan peta ini instansi pemerintah akan mudah mengomunikasikan proses bisnisnya, baik ke pihak internal maupun eksternal. Hal yang terpenting lagi, peta ini merupakan aset pengetahuan yang merupakan sumber informasi bagi para pengambil keputusan.

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi instansi pemerintah hingga saat ini adalah setiap unit organisasi melaksanakan tugas secara terkotak-kotak (silo). Karena itu, tidak terlihat hubungan kerja antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya. Hal ini akan berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

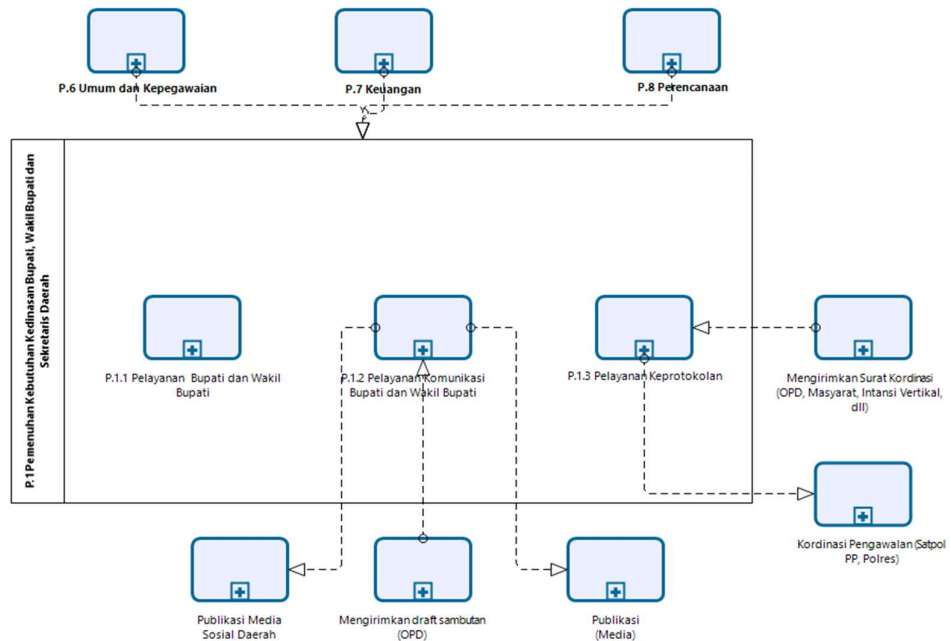
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai 9 (sembilan) proses yang terbagi dalam 5 (lima) Proses Utama dan 4 (empat) Proses Manajerial, dimana dari proses – proses tersebut diturunkan menjadi sub proses dan sub sub proses lebih detail dan dilaksanakan oleh bagian – bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan.

Tabel I.3  
Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan



Powered by bizagi Modeler

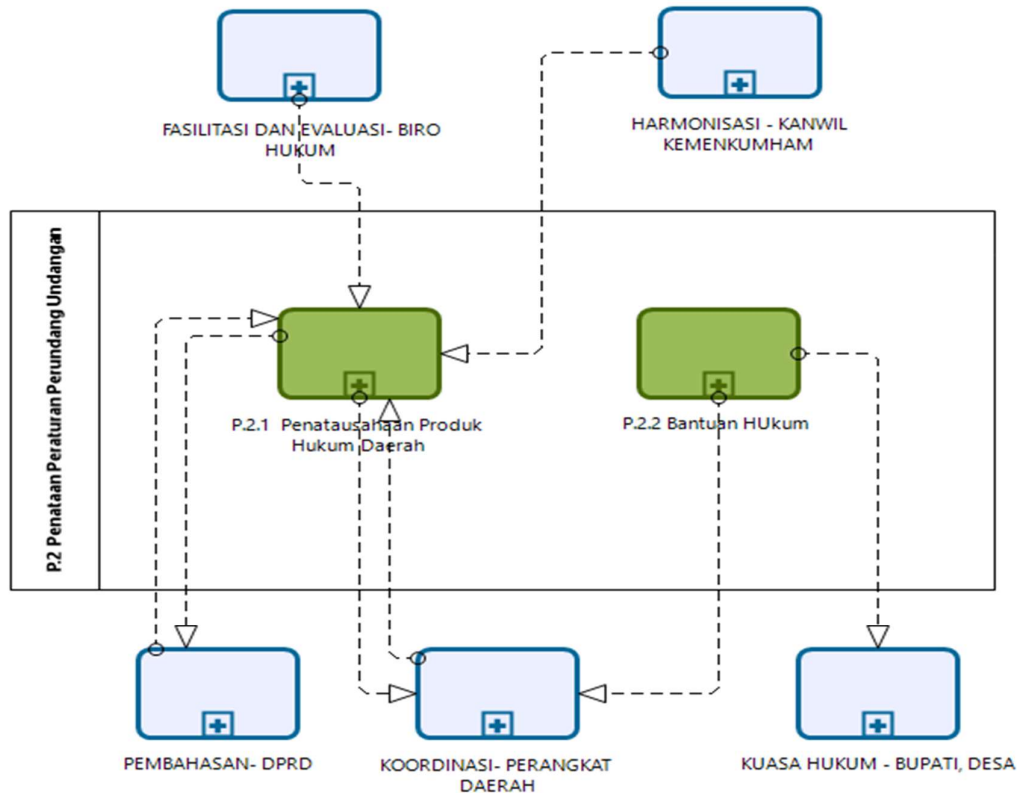
Tabel I.4  
Proses Bisnis Utama 1  
Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati



Powered by bizagi Modeler

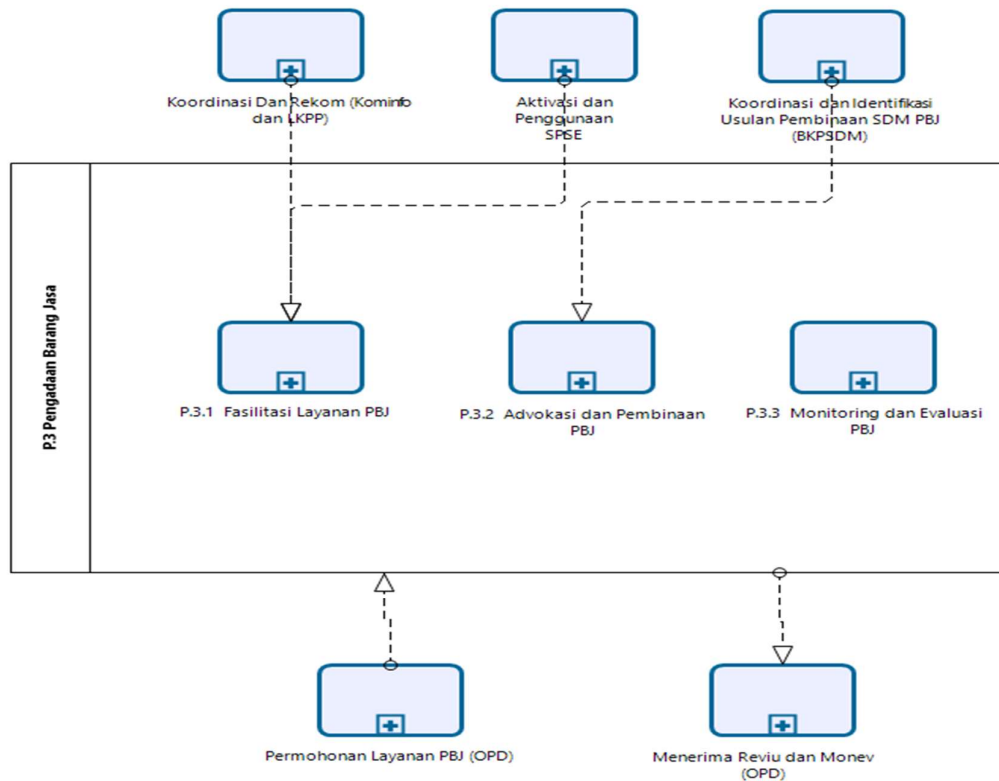
Proses utama P.1 Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati merupakan proses yang menjelaskan tentang tata cara pemenuhan kebutuhan Bupati dan wakil bupati yang terdiri dari 3 (tiga) sub proses dan untuk lebih spesifik juga terdapat sub sub proses lagi dibawahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Flowchart dan narasi sub proses dan sub sub proses dibawah ini.

Tabel I.5  
Proses Bisnis Utama 2  
Penataan Peraturan Perundang - Undangan



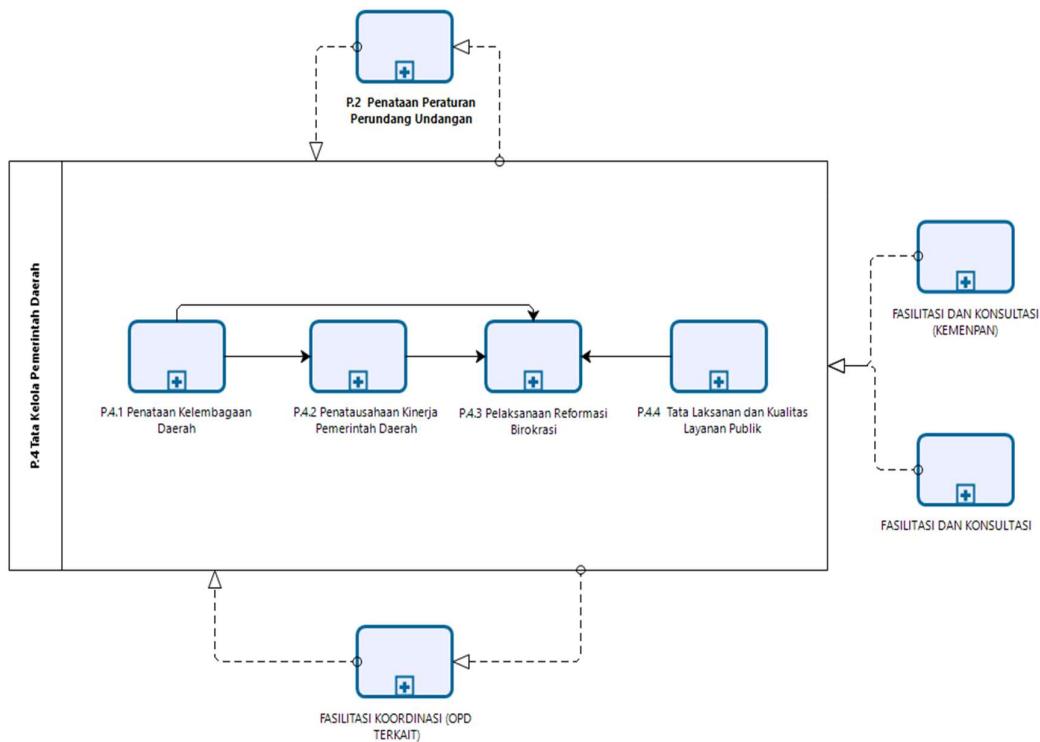
Proses penataan peraturan perundang-undangan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu Penatausahaan Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum.

Tabel I.6  
 Proses Bisnis Utama 3  
 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa



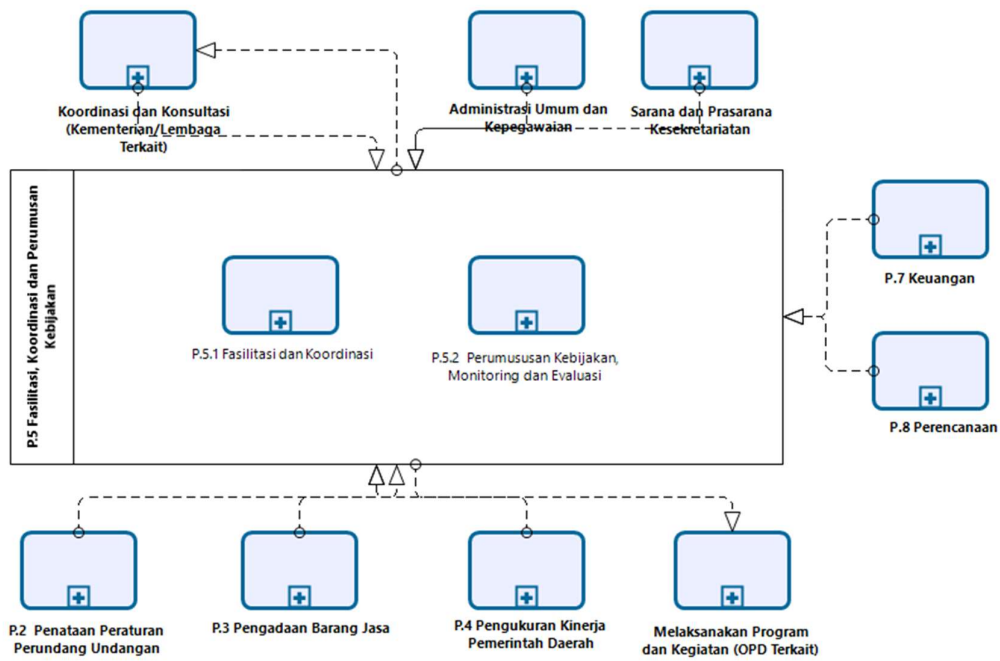
Pengadaan barang dan Jasa memiliki 3 aktivitas induk yaitu Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang Jasa, Advokasi Pembinaan Pengadaan Barang Jasa serta Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang Jasa.

Tabel I.7  
 Proses Bisnis Utama 4  
 Tata Kelola Pemerintahan



Tata Kelola Pemerintahan merupakan misi pertama dari empat misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik dapat terwujud melalui penataan kelembagaan daerah, penatausahaan kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi dan Tata Laksana dan Kualitas Pelayanan Publik. Selain itu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik juga dipengaruhi oleh penataan perundang undangan dan keterlibatan dari unsur eksternal lain, baik dari Perangkat Daerah, propinsi, maupun dari kementerian dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

Tabel I.8  
 Proses Bisnis Utama 5  
 Fasilitasi, Koordinasi dan Perumusan Kebijakan



Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan adalah sebagai koordinator dan fasulitasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) aktifitas pokok yaitu Fasilitasi dan Koordinasi dan Perumusan Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi.

## G. RINGKASAN HASIL EVALUASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka dicetuskan tujuan sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu *“Tata kelola pemerintahan dan efektif dan akuntabel”*.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja:
  - Score Nilai LPPD
  - Score Nilai Tata Kelola PBJ
2. Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah dengan indikator kinerja :
  - Score Nilai SAKIP PD
  - Score Nilai IKM PD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran dengan 3 (tiga) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Dari hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan sebesar 95,35% yang dalam skala ordinal termasuk kategori "SANGAT MEMUASKAN".

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan

mengalokasikan dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 33.755.180.503,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 31.233.826.768,34 atau 92,53 %.

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Namun dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul sehingga capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

## **H. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- i. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan;
- j. Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan;
- k. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 006 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- m. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

## **I. SISTEMATIKA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

*Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi SKPERANGKAT DAERAH (PD)*

#### **BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA**

*Pada bab ini diuraikan ringkasan / ihtisar rencana kinerja dan perjanjian penetapan kinerja tahun yang bersangkutan*

#### **BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025**

##### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

*Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai*

---

*dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan dengan analisis capaian kinerja.*

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

*Pada sub bab ini diuraikan antara pagu anggaran yang digunakan dan realisasi anggaran yang telaj digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi organisasi sesuai dengan pernyataan kinerja.*

#### **BAB 4 : PENUTUP**

*Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja.*

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**LAMPIRAN : RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025**

**LAMPIRAN : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025**



---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. KETERKAITAN MISI RPJMD, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

##### **1. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Maka tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah : *Tata kelola pemerintahan dan efektif dan akuntabel.*

Tabel II.1  
Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Score Nilai SAKIP Daerah
	Score Nilai IKM Daerah

## 2. Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah :

Tabel II.2  
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

TUJUAN	SASARAN	
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
	2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selanjutnya disusun dalam tabel berikut :

Tabel II.3  
Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Score Nilai SAKIP Daerah	1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD
				1.2	Score Nilai tata kelola PBJ
	Score Nilai IKM Daerah	2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	2.1	Score Nilai SAKIP PD
				2.2	Score Nilai IKM PD

Untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional.

Kebijakan merupakan strategi yang didalamnya berisi kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi dilaksanakan, mengatur mekanisme tindakan lanjutan serta mengarahkan pada dukungan untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Adapun strategi dan kebijakan yang

telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4

Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat melalui monitoring dan evaluasi serta penyusunan kebijakan pemerintahan umum	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan dan melaksanakan kerjasama bidang pemerintahan dan pembangunan
Peningkatan kinerja bidang perekonomian, SDA, pembangunan dan intensifikasi pelaksanaan UKPBJ	Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten bidang perekonomian, SDA, pembangunan dan penerapan PBJ sesuai regulasi yang berlaku
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan dan implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Peningkatan kualitas layanan Perangkat Daerah (PD)	Peningkatan pelayanan bidang kelembagaan, analisis jabatan, tata laksanakan, protokol, komunikasi pimpinan, dan kebutuhan dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

### 3. Program Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah

kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 3) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja yang dikomitmenkan dalam Perjanjian Kinerja dari Unsur Pimpinan sampai dengan pelaksana untuk dicapai dalam tahun 2025.

### **1. Penetapan Kinerja**

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus dari penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pertimbangan pemberian *reward and punishment*. Pada tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan melaksanakan 3 (tiga) program dan 18 (delapan belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut terlampir disampaikan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dan diketahui oleh Bupati Pacitan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tanggal 2 Januari 2025.

## 2. Rencana Aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan mempercepat langkah – langkah pencapaian kinerja telah ditetapkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang berisi rencana pencapaian target indikator dari tingkat sasaran sampai dengan indikator output kegiatan dan *schedule* pencapaian target tersebut.

Diharapkan dengan penetapan rencana Aksi tersebut dapat menjadi strategi yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Daftar Rencana Aksi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.5

Rencana Aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	URAIAN	INDIKATOR		4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	0	0	0	3,30
		1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	0	0	0	85
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	2.1	Score Nilai SAKIP PD	80	0	0	0
		2.1	Score Nilai IKM	0	90	0	0



---

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) merupakan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan implementasi LAKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja unit kerja dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran program dan kegiatan (*outcome*).

Sedangkan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut: a). Nilai  $>90 - \geq 100$  kategori Sangat Memuaskan; Nilai  $>80 - 90$  kategori Memuaskan; Nilai  $>70 - 80$  kategori Sangat Baik; Nilai  $>60 - 70$  kategori Baik; Nilai  $>50 - 60$  kategori Cukup; Nilai  $>30 - 50$  kategori Kurang; dan Nilai  $>0 - 30$  kategori Sangat Kurang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan telah mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 96,73% termasuk kategori "Sangat Memuaskan". Apabila dibanding dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja sasaran ini mengalami kenaikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

---

## **A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025**

### **1. Analisa Realisasi terhadap target Tahun 2025**

Pada tahun 2025 realisasi indikator sasaran yang dicapai ada yang telah melebihi target maupun belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu : 1) indikator sasaran 1 (satu) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan realisasi Score Nilai LPPD yang dicapai 3,3487 dari target yang ditetapkan yaitu 3,3000, realisasi Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ yang dicapai 82,83 dari target 85,00; 2) Indikator sasaran 2 (dua) Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah Score Nilai SAKIP PD dapat terealisasi pada nilai 71,85 dari target 80,00 dan Score Nilai IKM PD dapat terealisasi 88,37 dari target 90,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1  
Capaian Kinerja Sasaran dan capaian indikator kinerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Sasaran dan Indikator Sasaran						Indikator Program				
Uraian	Indikator	2025			Uraian	2025				
		Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian		
1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Score Nilai LPPD	3,3000	3,3487	101,48%	1.1.1 % kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, admistrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100,00%	132,73%	132,73%		
					1.1.2 % kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100,00%	105,56%	105,56%		
					1.1.3 % kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana.	100,00%	97,07%	97,07%		
	1.2 Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	85,00	82,83	97,45%	1.2.1 Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana	100,00%	110,71%	110,71%		
					1.2.2 % kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100,00%	259,84%	259,84%		
					1.2.3 % kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100,00%	119,05%	119,05%		
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 1</b>							<b>137,49%</b>			

2	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	2.1	Score Nilai SAKIP PD	80,00	71,85	89,81%	2.1.1	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100,00%	104,17%	104,17%
							2.1.2	Nilai SAKIP PD	80	71,85	89,81%
							2.1.3	% tata kelola keuangan yang terlaksana	100,00%	104,09%	104,09%
		2.2	Score Nilai IKM PD	90,00	88,37	98,19%	2.2.1	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan doku	100,00%	100,00%	100,00%
							2.2.2	% pemenuhan kebutuhan dasar sekretariat daerah	100,00%	100,00%	100,00%
							2.2.3	Nilai IKM PD	90	88,37	98,19%
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 2</b>						<b>94,00%</b>					<b>99,38%</b>
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 dan 2</b>						<b>96,73%</b>					<b>118,44%</b>

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan 2 (dua) sasaran dalam Rencana Strategis dengan rincian capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**” diarahkan untuk meningkatkan penerapan unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan daerah guna terwujudnya akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong percepatan pencapaian *good governance*.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran 1 (satu) tersebut yaitu : 1) Score Nilai LPPD dan 2) Score Nilai Tata Kelola PBJ dengan rincian capaian indikator sebagai berikut:

Tabel III.2  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1(satu)  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Sasaran		Indikator Kinerja		2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	3,3000	3,3487	101,48%
		1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	85,00	82,83	97,45%
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 1</b>						<b>99,46%</b>

Pengukuran capaian Sasaran 1 dilakukan melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Skor Nilai LPPD dan Skor Nilai Indeks Tata Kelola PBJ.

Pada tahun 2025, target Skor Nilai LPPD ditetapkan sebesar 3,3000 dengan realisasi sebesar 3,3487 atau mencapai 101,48% dari target. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Penilaian LPPD Tahun 2025 masih menggunakan hasil penilaian Tahun 2024, mengingat hasil evaluasi untuk tahun berjalan belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, nilai yang digunakan masih bersifat proyeksi berdasarkan hasil evaluasi terakhir yang tersedia.

Selanjutnya, target Skor Nilai Indeks Tata Kelola PBJ sebesar 85,00 terealisasi sebesar 82,83 atau mencapai 97,45%. Capaian ini juga belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Meskipun salah satu indikator belum mencapai target yang ditentukan karena keterbatasan ketersediaan hasil evaluasi tahun berjalan, secara keseluruhan rata-rata capaian indikator Sasaran 1 adalah sebesar **99,46%**. Berdasarkan kategori penilaian kinerja, capaian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Sangat Memuaskan.

Ke depan, perangkat daerah akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
2. Penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko.
3. Optimalisasi tata kelola PBJ melalui digitalisasi dan peningkatan kompetensi SDM.
4. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi pencapaian target.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan didukung dengan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel III.3  
Capaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	Keterangan
1	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan,bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Terlaksana</b>	%	<b>100,00</b>	<b>97,07</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score LPPD</b>
		Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana	%	100,00	132,73	
		Persentase dibidang Bina Mental dan Spiritual,Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana	%	100,00	105,56	
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan</b>	%	<b>100,00</b>	<b>95,45</b>	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	12	12	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	22	19	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	17	17	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra</b>	%	<b>100,00</b>	<b>105,56</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	dokumen	150	175	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan	dokumen	175	175	

		Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	80	80	
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum</b>	%	<b>100,00</b>	<b>97,07</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	dokumen	7	7	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	umlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	5	4	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	dokumen	777	864	
	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama</b>	%	<b>100,00</b>	<b>170,00</b>	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	dokumen	10	17	
2	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Kebijakan dibidang Penyusunan Program, Pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana</b>	%	<b>100,00</b>	<b>119,05</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score Tata Kelola PBJ</b>
		<b>Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana</b>	%	<b>100,00</b>	<b>110,71</b>	
		<b>Persentase Kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana</b>	%	<b>100,00</b>	<b>259,84</b>	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian</b>	%	<b>100,00</b>	<b>121,42</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dokumen	25	25	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	dokumen	35	50	
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan</b>	%	<b>100,00</b>	<b>119,05</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	dokumen	7	11	

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	12	12
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	12	12
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa</b>	%	<b>100,00</b>	<b>259,84</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	110	74
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	24	117
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	400	899
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	dokumen	12	12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	12	12

## Sasaran 2

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah

Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah**” diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan. Capaian indikator kinerja sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu : 1) Score Nilai SAKIP PD dan 2) Score Nilai IKM PD dengan rincian capaian indikator sebagai berikut :

Tabel III.4

Capaian Kinerja Sasaran dan capaian indikator kinerja sasaran 2  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		2025		
			Target	Realisasi	Capaian
2 Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah	2.1	Score Nilai SAKIP PD	80,00	71,85	89,81%
	2.2	Score Nilai IKM PD	90,00	88,37	98,19%
<b>Rata – rata capaian sasaran Indikator 2</b>					<b>94,00%</b>

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Perangkat Daerah menetapkan Sasaran 2 yaitu *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah*. Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Skor Nilai SAKIP PD dan Skor Nilai IKM PD.

Pada tahun 2025, target Skor Nilai SAKIP PD ditetapkan sebesar 80,00 dengan realisasi sebesar 71,85 atau mencapai 89,81% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada konsistensi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi internal.

Sementara itu, Skor Nilai IKM PD ditargetkan sebesar 90,00 dan terealisasi sebesar 88,37 atau mencapai 98,19% dari target. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Perangkat Daerah berada pada kategori sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi prosedur, kecepatan layanan, maupun sikap petugas.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator pada Sasaran 2 adalah sebesar 94,00%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah berada pada kategori baik. Meskipun demikian, diperlukan langkah-



langkah perbaikan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target secara optimal pada tahun berikutnya yaitu :

1. Penguatan implementasi SAKIP melalui peningkatan kualitas perencanaan dan cascading kinerja.
2. Optimalisasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
3. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan publik.
4. Pemanfaatan hasil survei IKM sebagai dasar perbaikan standar pelayanan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah didukung dengan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel III.5  
Capaian indikator kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	satuan	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	Keterangan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score IKM
		Persentase Tata Kelola Keuangan Yang Terlaksana	%	100	104,09	Mendukung indikator sasaran Score SAKIP
		Persentase Kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana	%	100	104,17	Mendukung indikator sasaran Score SAKIP
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score IKM
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Presentase tata kelola perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score SAKIP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	%	100	108,18	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.540	1.792	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	14	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	102	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	200	204	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score IKM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	32	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150	150	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan layanan umum kantor	Laporan	12	12	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	89	89	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score SAKIP</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	28	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	28	
	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score IKM</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang Disediakan	Paket	12	12	
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Presentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi</b>	%	<b>100</b>	<b>104,17</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score SAKIP</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	39	39	

	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	6	6	<b>Mendukung indikator sasaran Score IKM</b>
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8	9	
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	240	240	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	240	240	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	240	240	

## 2. Analisa Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Sesuai dengan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 s/d 2026 telah ditentukan target tahunan masing – masing indikator, dari target yang telah ditentukan dapat dievaluasi capaian indikator Tahun 2025 dengan Tahun 2024. Sasaran 1 (satu) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator pertama score nilai LPPD mengalami peningkatan pada nilai 3,3487, untuk indikator score nilai Tata Kelola PBJ mengalami peningkatan pada nilai 82,83. Sasaran 2 (dua), yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah. Indikator pertama Score Nilai SAKIP PD terdapat kenaikan nilai dari 70,35 menjadi 71,85, untuk indikator score nilai IKM PD terdapat kenaikan dari 83,59 menjadi 88,37, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6  
Capaian indikator kinerja sasaran  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan

Sasaran dan Indikator Sasaran													
Uraian	Indikator	Target Renstra PD						Realisasi Renstra PD					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Score Nilai LPPD	2,6500	2,7000	2,7500	3,2500	3,3000	3,3000	2,8600	2,8600	3,2368	3,2368	3,3487	
	1.2 Score Nilai Tata Kelola PBJ	45	50	55	65	85	85	41.23	50.60	65.67	81,02	82,83	
2 Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah	2.1 Score Nilai SAKIP PD	70	72	74	76	80	80,20	80.30	80.30	79.60	70,35	71,85	
	2.2 Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	90	90	78.78	83.18	88.31	83,59	88,37	

Tabel III.7  
Capaian Kinerja Sasaran dan capaian indikator kinerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

No.	Uraian	Indikator Program						Realisasi Program PD						
		Target Program PD						Realisasi Program PD						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.1	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, admnistrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	132,73%	
1.1.2	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	105,56%	
1.1.3	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,07%	
1.2.1	Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	110,71%	
1.2.2	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	259,84%	
1.2.3	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	119,05%	

2.1.1	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	104,17%	
2.1.2	Nilai SAKIP PD	70	72	74	76	80	80,20	80.30	80.30	79.60	70.35	71,85	
2.1.3	% tata kelola keuangan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	104,09%	
2.2.1	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan doku% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	
2.2.2	Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	90	90	78.78	83.18	88.31	83,59	88,37	

### 3. Analisa Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel dibawah ini menunjukkan Analisa kinerja sasaran Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra (2026) dimana dapat dilihat realisasi sampai tahun 2025 ada beberapa yang sudah melebihi target akhir Renstra, untuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.8  
Analisa realisasi kinerja 2025 terhadap target akhir kinerja Renstra 2026

Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Score Nilai LPPD	3,3000	3,2368	101,48%%
	1.2 Score Nilai Tata Kelola PBJ	85,00	82,83	97,45%
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 1</b>				<b>99,46%</b>
2 Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah	2.1 Score Nilai SAKIP PD	80,20	71,85	89,59%
	2.2 Score Nilai IKM PD	90,00	88,37	98,19%
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 2</b>				<b>93,89%</b>
<b>Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 &amp; 2</b>				<b>96,73%</b>

Untuk capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.9  
Realisasi kinerja Program Kegiatan 2025 terhadap target akhir kinerja Program Kegiatan 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program		Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	1.1.1	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, admnistrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100,00%	132,73%	132,73%
		1.1.2	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100,00%	105,56%	105,56%
		1.1.3	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100,00%	97,07%	97,07%
2	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	1.2.1	Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana	100,00%	110,71%	110,71%
		1.2.2	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100,00%	259,84%	259,84%
		1.2.3	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100,00%	119,05%	119,05%
3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.1.1	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100,00%	104,17%	104,17%
		2.1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,20	71,85	89,59%
		2.1.3	% tata kelola keuangan yang terlaksana	100,00%	104,09%	104,09%
		2.2.1	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumen kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.2	Nilai IKM PD	90	88,37	98,19%

#### 4. Analisa Standar Provinsi Jawa Timur

Realisasi Indikator di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan apabila dibandingkan dengan indikator/standar Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

Tabel III.10  
Capaian indikator kinerja daerah terhadap indikator Provinsi Jawa Timur

Sasaran		Indikator		Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Nilai LPPD	3,3487	3,6970	90,58%
		1.2	Indeks Tata Kelola PBJ	82,83		69,54
<b>Rata - rata capaian sasaran 1</b>						<b>104,85%</b>
2	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	2.1	Score Nilai SAKIP PD	71,85	83,89	85,65%
		2.2	Score Nilai IKM PD	88,37	95,65	92,39%
<b>Rata - rata capaian sasaran 2</b>						<b>89,02%</b>
<b>Rata - rata capaian sasaran</b>						<b>96,93%</b>

Evaluasi kinerja daerah juga dilakukan melalui perbandingan capaian indikator dengan realisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tolok ukur kinerja regional. Perbandingan ini memberikan gambaran tingkat kemajuan relatif daerah dalam mendukung pencapaian kinerja provinsi.

Untuk sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut, Pada indikator Nilai LPPD, realisasi daerah sampai dengan Tahun 2025 sebesar 3,3487, sedangkan realisasi Provinsi Jawa Timur sebesar 3,6970, dengan tingkat kemajuan sebesar 90,58%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian daerah masih berada di bawah rata-rata provinsi dan memerlukan

upaya peningkatan, khususnya dalam aspek tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, pada indikator Indeks Tata Kelola PBJ, realisasi daerah sebesar 82,83, lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Jawa Timur sebesar 69,54, dengan tingkat kemajuan mencapai 119,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola Pengadaan Barang/Jasa di daerah telah melampaui capaian provinsi dan dapat dikategorikan sangat baik.

Secara rata-rata, capaian Sasaran 1 dibandingkan Provinsi Jawa Timur mencapai 104,85%, yang menunjukkan bahwa secara agregat kinerja daerah berada sedikit di atas capaian provinsi.

Untuk sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat Daerah Pada indikator Skor Nilai SAKIP PD, realisasi daerah sebesar 71,85, sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 83,89, dengan tingkat kemajuan 85,65%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi SAKIP daerah masih perlu ditingkatkan agar setara atau melampaui capaian provinsi.

Selanjutnya, pada indikator Skor Nilai IKM PD, realisasi daerah sebesar 88,37, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 95,65, dengan tingkat kemajuan 92,39%. Meskipun belum melampaui capaian provinsi, nilai ini menunjukkan kinerja pelayanan publik yang tetap berada dalam kategori baik.

Rata-rata capaian Sasaran 2 dibandingkan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 89,02%, yang mengindikasikan bahwa kinerja tata kelola perangkat daerah masih berada di bawah capaian provinsi dan memerlukan penguatan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran daerah terhadap Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 95,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja daerah secara umum sudah mendekati capaian provinsi, dengan beberapa indikator yang telah melampaui rata-rata provinsi, khususnya pada tata kelola PBJ, kedepan, strategi peningkatan akan difokuskan pada :

1. Penguatan implementasi SAKIP dan manajemen kinerja perangkat daerah.
2. Peningkatan kualitas LPPD melalui perbaikan perencanaan dan evaluasi kinerja.
3. Replikasi praktik baik pada tata kelola PBJ ke sektor tata kelola lainnya.
4. Optimalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan nilai IKM.

## **5. Analisa Pencapaian Kinerja**

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 ini di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Berikut kami sampaikan Analisa Pencapaian Kinerja per sasaran :

### **5.1 Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, rata-rata capaian Sasaran 1 sebesar **101,48%**, dengan rata-rata capaian indikator program sebesar **111,78%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sangat baik.

Nilai LPPD terealisasi sebesar 3,3487 dari target 3,3000 (101,48%%). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada kategori baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian tersebut antara lain:

- ✓ Dasar penilaian masih menggunakan Beberapa indikator LPPD merupakan indikator komposit yang dipengaruhi oleh kinerja lintas perangkat daerah.
- ✓ Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data dukung belum sepenuhnya optimal.
- ✓ Masih terdapat aspek administratif yang perlu penyempurnaan dalam pemenuhan dokumen evaluasi.

Sementara itu, Nilai Indeks Tata Kelola PBJ terealisasi sebesar 82,83 dari target 85,00 (97,45%). Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa sudah berjalan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

- ✓ Keterlambatan proses pada sebagian paket pengadaan;
- ✓ Kualitas perencanaan pengadaan yang belum sepenuhnya seragam;
- ✓ Kapasitas SDM pengelola PBJ yang masih perlu penguatan;
- ✓ Berdasarkan SE Kepala LKPP penilaian ITKP menggunakan penilaian tahun sebelumnya (2024) sehingga belum mewakili sepenuhnya keadaan tahun 2025.

Di sisi lain, tingginya capaian indikator program (di atas 100%) disebabkan oleh : 1) Optimalisasi koordinasi lintas bagian; 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala; 3) Pemanfaatan sistem elektronik dalam pengelolaan administrasi dan PBJ dan 4) Komitmen percepatan pelaksanaan program prioritas.

Upaya Perbaikan akan dilakukan untuk meningkatkan indikator Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dengan :

1. Penguatan quality control dokumen LPPD sebelum penyampaian.
2. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM PBJ.
3. Penyusunan early warning system terhadap indikator strategis.
4. Penguatan integrasi perencanaan dan pengendalian berbasis risiko.

Dengan langkah tersebut diharapkan indikator makro dapat meningkat dan selaras dengan tingginya capaian indikator program.

## **5.2 Sasaran Kedua Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah**

Rata-rata capaian Sasaran 2 pada Tahun 2025 sebesar **94%**, dengan rata-rata capaian indikator program sebesar **99,38%**. Secara umum, pelaksanaan tata kelola perangkat daerah telah berjalan baik dan relatif stabil.

Nilai SAKIP PD terealisasi sebesar 71,85 dari target 80,00 (89,81%). Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih memerlukan penguatan. Faktor yang mempengaruhi antara lain: 1) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya berbasis outcome; 2) Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum optimal; 3) Penyusunan indikator kinerja belum seluruhnya

memenuhi prinsip SMART dan 4) Dokumentasi dan eviden pendukung evaluasi belum terdokumentasi secara sistematis.

Sementara itu, Nilai IKM PD terealisasi sebesar 88,37 dari target 90,00 (98,19%). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan internal dan dukungan sekretariat terhadap pimpinan dan perangkat daerah berada pada kategori sangat baik. Hal ini didukung oleh: 1) Pelaksanaan fungsi protokol dan komunikasi pimpinan yang efektif; 2) Pemenuhan kebutuhan dasar sekretariat yang memadai dan 3) Tata kelola keuangan yang relatif tertib dan akuntabel.

Upaya Perbaikan akan dilakukan untuk meningkatkan indikator Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dengan :

Reviu dan penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu.

1. Penyusunan indikator berbasis hasil dan dampak (outcome oriented).
2. Penguatan peran APIP dalam reviu dan evaluasi internal SAKIP.
3. Integrasi sistem e-planning dan e-budgeting secara lebih konsisten.
4. Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis dan benchmarking.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sasaran strategis Tahun 2025 sebesar **95,35%**, sedangkan rata-rata capaian indikator program mencapai **118,44%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat baik dan bahkan melampaui target.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara tingginya capaian output program dengan capaian indikator makro yang dinilai secara komprehensif oleh evaluator

eksternal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola berbasis hasil (result-based management) dan penguatan akuntabilitas kinerja masih perlu menjadi prioritas perbaikan pada tahun berikutnya.

Dengan komitmen perbaikan berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan pada tahun mendatang capaian indikator makro dapat meningkat dan sejalan dengan capaian indikator program yang telah sangat baik.

## **6. Analisa Efisiensi penggunaan sumber daya**

### **a. Efisiensi Anggaran**

Analisa ini adalah membandingkan sumber daya anggaran dan kinerja dilakukan dengan mengukur variable capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi perencanaan. Dalam hal menjalankan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tentu saja memerlukan anggaran meskipun tidak selalu. Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan anggaran apakah sudah efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pagu anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan capaian indikator sasaran.

Analisis efisiensi anggaran merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut alasan-alasan pentingnya melakukan analisis ini:

#### **1. Mengukur Penggunaan Sumber Daya secara Optimal**

Analisis efisiensi membantu menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan

dapat menghasilkan capaian kinerja yang maksimal tanpa pemborosan. Ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik.

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi  
Dengan adanya analisis efisiensi, pengelola anggaran dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan kepada publik dan pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas instansi.
3. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat  
Data efisiensi menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk mengevaluasi program yang berjalan, mengidentifikasi area pemborosan, dan menentukan prioritas pengalokasian anggaran di masa mendatang.
4. Memperkuat Perencanaan dan Pengendalian Anggaran  
Hasil analisis efisiensi mendorong perbaikan proses perencanaan anggaran agar lebih realistis dan berbasis kinerja, serta memperkuat pengendalian selama pelaksanaan agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
5. Mendorong Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan  
Efisiensi anggaran yang baik berarti organisasi mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih luas dengan sumber daya yang terbatas, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menunjang Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Akuntabilitas Pemerintah

Analisis ini merupakan bagian dari pemenuhan standar akuntabilitas keuangan

---

negara dan instrumen evaluasi kinerja yang diwajibkan oleh Permen PANRB dan peraturan terkait.

Secara ringkas, analisis efisiensi anggaran adalah alat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik benar-benar memberikan hasil yang maksimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel III.11  
Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Prosentase	Efisiensi Penggunaan Anggaran
Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	Score Nilai SAKIP PD	80	71,85	89,81%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Rp14.838.052.306,00</b>	<b>Rp13.905.734.086,01</b>	<b>Rp932.318.220,00</b>	<b>93,72%</b>	<b>-3,91%</b>
					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp170.494.604,00</b>	<b>Rp169.786.681,01</b>	<b>Rp707.923,00</b>	<b>99,58%</b>	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp170.494.604,00	Rp169.786.681,01	Rp707.923,00	99,58%	
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp12.453.172.269,00</b>	<b>Rp11.864.289.749,00</b>	<b>Rp588.882.520,00</b>	<b>95,27%</b>	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.346.292.466,00	Rp10.789.667.578,00	Rp556.624.888,00	95,09%	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp1.106.879.803,00	Rp1.074.622.171,00	Rp32.257.632,00	97,09%	
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp110.809.808,00</b>	<b>Rp110.376.372,00</b>	<b>Rp433.436,00</b>	<b>99,61%</b>	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp110.809.808,00	Rp110.376.372,00	Rp433.436,00	99,61%	
					<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Rp2.103.575.625,00</b>	<b>Rp1.761.281.284,00</b>	<b>Rp342.294.341,00</b>	<b>83,73%</b>	

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp1.503.575.625,00	Rp1.161.281.284,00	Rp342.294.341,00	77,23%	
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	100,00%	
	<b>Score Nilai IKM PD</b>	<b>90</b>	<b>88,37</b>	<b>98,19%</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Rp12.109.418.849,00</b>	<b>Rp11.819.773.107,34</b>	<b>Rp289.645.741,66</b>	<b>97,61%</b>	<b>0,58%</b>
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp4.014.784.319,00</b>	<b>Rp3.945.905.930,00</b>	<b>Rp68.878.389,00</b>	<b>98,28%</b>	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.119.314.865,00	Rp1.097.823.527,00	Rp21.491.338,00	98,08%	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp452.157.852,00	Rp450.163.675,00	Rp1.994.177,00	99,56%	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp1.119.934.000,00	Rp1.084.176.651,00	Rp35.757.349,00	96,81%	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.323.377.602,00	Rp1.313.742.077,00	Rp9.635.525,00	99,27%	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp1.097.112.908,00</b>	<b>Rp1.094.515.496,00</b>	<b>Rp2.597.412,00</b>	<b>99,76%</b>	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.097.112.908,00	Rp1.094.515.496,00	Rp2.597.412,00	99,76%	
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp1.465.328.508,00</b>	<b>Rp1.419.216.377,00</b>	<b>Rp46.112.131,00</b>	<b>96,85%</b>	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp988.650.093,00	Rp955.955.736,00	Rp32.694.357,00	96,69%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp185.955.986,00	Rp185.744.570,00	Rp211.416,00	99,89%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp290.722.429,00	Rp277.516.071,00	Rp13.206.358,00	95,46%
				<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</b>	<b>Rp3.686.239.724,00</b>	<b>Rp3.545.913.832,34</b>	<b>Rp140.325.891,66</b>	<b>96,19%</b>
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp2.448.630.030,00	Rp2.348.556.223,34	Rp100.073.806,66	95,91%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp1.045.814.829,00	Rp1.005.845.287,00	Rp39.969.542,00	96,18%
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Rp191.794.865,00	Rp191.512.322,00	Rp282.543,00	99,85%
				<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Rp521.228.458,00</b>	<b>Rp499.145.995,00</b>	<b>Rp22.082.463,00</b>	<b>95,76%</b>
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp176.323.000,00	Rp165.661.676,00	Rp10.661.324,00	93,95%
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp200.073.438,00	Rp191.114.553,00	Rp8.958.885,00	95,52%
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp144.832.020,00	Rp142.369.766,00	Rp2.462.254,00	98,30%

					<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp1.324.724.932,00</b>	<b>Rp1.315.075.477,00</b>	<b>Rp9.649.455,00</b>	<b>99,27%</b>	
					Fasilitasi Keprotokolan	Rp830.562.387,00	Rp828.777.667,00	Rp1.784.720,00	99,79%	
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp172.315.305,00	Rp165.333.483,00	Rp6.981.822,00	95,95%	
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp321.847.240,00	Rp320.964.327,00	Rp882.913,00	100,00%	
<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan</b>	<b>Score Nilai LPPD</b>	<b>3,3000</b>	<b>3,2368</b>	<b>101,48 %</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Rp4.839.652.208,00</b>	<b>Rp3.716.028.391,00</b>	<b>Rp1.123.623.817,00</b>	<b>76,78%</b>	<b>24,70%</b>
					<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Rp574.803.574,00</b>	<b>Rp573.721.290,00</b>	<b>Rp1.082.284,00</b>	<b>99,81%</b>	
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp98.186.122,00	Rp97.988.965,00	Rp197.157,00	99,80%	
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp279.066.562,00	Rp278.422.173,00	Rp644.389,00	99,77%	
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp197.550.890,00	Rp197.310.152,00	Rp240.738,00	99,88%	
					<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp3.643.451.444,00</b>	<b>Rp2.551.059.530,00</b>	<b>Rp1.092.391.914,00</b>	<b>70,02%</b>	
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp3.166.554.206,00	Rp2.203.266.719,00	Rp963.287.487,00	69,58%	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp47.694.362,00	Rp29.642.374,00	Rp18.051.988,00	62,15%	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp429.202.876,00	Rp318.150.437,00	Rp111.052.439,00	74,13%	

					<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Rp522.802.748,00</b>	<b>Rp492.760.402,00</b>	<b>Rp30.042.346,00</b>	<b>94,25%</b>	
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp232.441.562,00	Rp222.816.250,00	Rp9.625.312,00	95,86%	
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp159.154.480,00	Rp143.892.015,00	Rp15.262.465,00	90,41%	
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp131.206.706,00	Rp126.052.137,00	Rp5.154.569,00	96,07%	
					<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Rp98.594.442,00</b>	<b>Rp98.487.169,00</b>	<b>Rp107.273,00</b>	<b>99,89%</b>	
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp98.594.442,00	Rp98.487.169,00	Rp107.273,00	99,89%	
<b>Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ</b>	<b>85</b>	<b>82,83</b>	<b>97,45%</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp1.968.057.140,00</b>	<b>Rp1.792.291.184,00</b>	<b>Rp175.765.956,00</b>	<b>91,07%</b>	6,38%
					<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Rp297.192.736,00	Rp286.108.667,00	Rp11.084.069,00	96,27%	
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp106.039.654,00	Rp99.254.755,00	Rp6.784.899,00	93,60%	
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rp191.153.082,00	Rp186.853.912,00	Rp4.299.170,00	97,75%	
					<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp480.323.482,00</b>	<b>Rp455.565.612,00</b>	<b>Rp24.757.870,00</b>	<b>94,85%</b>	
					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp246.138.586,00	Rp237.683.909,00	Rp8.454.677,00	96,57%	
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp135.408.857,00	Rp127.069.820,00	Rp8.339.037,00	93,84%	

				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp98.776.039,00	Rp90.811.883,00	Rp7.964.156,00	91,94%	
				<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp686.296.321,00</b>	<b>Rp661.919.057,00</b>	<b>Rp24.377.264,00</b>	<b>96,45%</b>	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp281.087.511,00	Rp271.138.917,00	Rp9.948.594,00	96,46%	
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp152.421.515,00	Rp146.139.170,00	Rp6.282.345,00	95,88%	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp252.787.295,00	Rp244.640.970,00	Rp8.146.325,00	96,78%	
				<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp504.244.601,00</b>	<b>Rp388.697.848,00</b>	<b>Rp115.546.753,00</b>	<b>77,09%</b>	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp450.000.000,00	Rp342.895.724,00	Rp107.104.276,00	76,20%	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp54.244.601,00	Rp45.802.124,00	Rp8.442.477,00	84,44%	
<b>Jumlah</b>					<b>Rp33.755.180.503,00</b>	<b>Rp31.233.826.768,35</b>	<b>Rp2.521.353.734,66</b>		
Capaian Kinerja/ Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran		96,73%						92,55%	4,18%

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip *value for money*, Sekretariat Daerah Tahun 2025 melakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan pagu anggaran, realisasi anggaran, dan capaian rata – rata indikator secara keseluruhan maupun masing-masing indikator sasaran.

Dari data Tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Efisiensi capaian rata-rata keseluruhan Sekretariat Daerah

- Total Pagu Anggaran: Rp33.755.180.503,00
- Realisasi Anggaran: Rp31.233.826.768,34 (92,55%)
- Capaian Kinerja: 96,73% (Sangat Memuaskan)

Pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dengan fokus pada pencapaian output dan outcome yang maksimal, sesuai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis efisiensi menggunakan rumus:

$$E = \frac{(PAK \times CK) - RAK}{PAK} \times 100\%$$

Didapatkan tingkat efisiensi sebesar **4,14%**, yang menandakan:

- Realisasi anggaran lebih rendah dari pagu proporsional berdasarkan capaian kinerja.
- Penggunaan sumber daya yang optimal tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas hasil kerja.
- Penerapan prinsip *value for money* berjalan efektif.

2. Perhitungan efisiensi dilakukan pada level indikator sasaran dengan menggunakan total pagu anggaran program pendukung masing-masing indikator dengan Hasil Perhitungan Efisiensi per Indikator sebagai berikut :

#### **A. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah**

##### **1) Indikator Score Nilai SAKIP PD**

Dari hasil perhitungan terdapat Efisiensi sebesar **-3,90%**.

Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai kinerja proporsional yang dihasilkan. Meskipun demikian, capaian kinerja sebesar 89,81% tetap berada dalam kategori baik, sehingga kondisi ini masih dalam batas toleransi pengelolaan anggaran.

##### **2) Indikator Score Nilai IKM PD**

Dari hasil perhitungan terdapat Efisiensi sebesar **0,58%**.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran hampir sepenuhnya selaras dengan capaian kinerja (98,19%). Dengan demikian, pengelolaan anggaran pada indikator ini dapat dikategorikan efisien dan optimal.

#### **b. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

##### **1) Indikator Score Nilai LPPD**

Dari hasil perhitungan terdapat Efisiensi sebesar **24,70%**.

Nilai efisiensi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa capaian kinerja (101,48% dapat diperoleh dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu proporsionalnya. Kondisi ini mencerminkan optimalisasi sumber daya dan pengendalian belanja yang baik.

## 2) Indikator Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ

Dari hasil perhitungan terdapat Efisiensi sebesar 6,38%.

Hasil ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang tetap mampu mendukung capaian kinerja sebesar 97,45%. Dengan demikian, indikator ini tergolong efisien dan efektif.

Secara umum, dari empat indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukkan kondisi efisien dan 1 (satu) indikator menunjukkan deviasi efisiensi minor. tidak terdapat pemborosan anggaran yang signifikan serta rata-rata capaian kinerja seluruh indikator berada pada kategori Sangat Memuaskan.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah menerapkan prinsip Ekonomis (belanja terkendali dan sesuai kebutuhan), Efisien (input anggaran mampu menghasilkan output optimal) dan Efektif (target kinerja tercapai dengan baik).

Efisiensi didukung oleh beberapa factor antara lain : 1) Perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*); 2) Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, 3) Pengendalian belanja operasional yang ketat dan 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Langkah-langkah Perbaikan yang akan dilakukan Tahun Berikutnya : 1) Meningkatkan keterkaitan langsung antara belanja program dan indikator outcome; 2) Melakukan evaluasi mendalam pada indikator dengan efisiensi negative; 3) Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dan

4) Mendorong inovasi pelayanan untuk mempertahankan efisiensi tinggi pada indikator LPPD dan PBJ.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 secara umum telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan capaian kinerja rata-rata sangat memuaskan dan tingkat efisiensi positif pada sebagian besar indikator, dapat disimpulkan bahwa prinsip *value for money* telah diimplementasikan secara optimal.

#### b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi, komposisi, dan kapasitas pegawai, serta sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan SDM yang lebih efektif dan berkelanjutan. Evaluasi ini disusun berdasarkan data kepegawaian per Desember 2025.

##### 1) Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel III.12

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah

ASN		NON ASN	
KATEGORI ASN	JUMLAH	KATEGORI KONTRAK	JUMLAH
PNS/CPNS	86 orang	Kontrak Daerah	8 orang
PPPK	17 orang	Kontrak Kegiatan	27 orang
PPPK Paruh Waktu	94 orang		
<b>Jumlah ASN</b>	<b>197 orang</b>	<b>Jumlah Non ASN</b>	<b>35 orang</b>

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah **sangat bergantung pada tenaga ASN**, khususnya tenaga PPPK Paruh Waktu.

## 2) Distribusi Pegawai per Unit Kerja

Distribusi pegawai pada setiap bagian di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.13

Jumlah Pegawai ASN setiap bagian di Sekretariat Daerah

FORMASI PEGAWAI SETDA TAHUN 2025					PPKK		PPPK Paruh Waktu	
NO	UNIT KERJA / BAGIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI PNS, CPNS	L	P	L	P
		L	P					
1	Sekretaris Daerah	1	-	1	-	-	-	-
2	Asisten	-	-	-	-	-	-	-
3	Staf Ahli	2	-	2	-	-	-	-
4	Bagian Pemerintahan	5	2	7	1	1	2	1
5	Bagian Organisasi	2	3	5	1	1	-	-
6	Bagian Pembangunan	3	2	5	-	1	3	1
7	Bagian Perekonomian	2	1	3	2	-	4	2
8	Bagiann Hukum	3	4	7			1	1
9	Bagian PBJ	6	5	11	3	2	1	-
10	Bagian Umum	20	11	31	2	2	46	24
11	Bagian Prokopim	4	6	10			2	1
12	Bagian Kesra	3	1	4		1	3	2
<b>JUMLAH ASN</b>		<b>51</b>	<b>35</b>	<b>86</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>32</b>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa distribusi pegawai pada setiap bagian belum merata. **Bagian Umum** menampung jumlah pegawai terbesar, terutama tenaga PPPK Paruh Waktu dan Non ASN. Hal ini mengindikasikan:

- Beban kerja operasional tinggi
- Ketergantungan pada tenaga pendukung non-struktural
- Potensi ketidakseimbangan efisiensi antar bagian

Unit kerja lain relatif memiliki jumlah ASN yang terbatas sehingga berpotensi mengalami keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan fungsi strategis.

### 3) Tingkat Pendidikan

Sebaran tingkat pendidikan ASN Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.14

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JML PNS, CPNS	PPPK		PPPK Paruh Waktu	
		L	P		L	P	L	P
1	S-3	1	-	1	-	-	-	-
2	S-2	11	8	19	-	-	-	-
3	S-1	16	21	37	4	5	-	-
4	D-IV	4	1	5	-	-	-	-
5	D-III	-	1	1	2	-	-	-
6	D-II	1	-	1	-	-	-	-
7	D-I	-	-	-	-	-	-	-
8	SLTA / SEDERAJAT	18	4	22	2	3	61	30
9	SLTP / SEDERAJAT	-	-	-	1	-	1	2
10	SD	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH ASN</b>		<b>51</b>	<b>35</b>	<b>86</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>32</b>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebaran tingkat Pendidikan ASN Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- Pendidikan **S1 ke atas** relatif terbatas dibandingkan total pegawai
- Pegawai dengan pendidikan **SLTA/ sederajat** masih mendominasi, terutama pada PPPK Paruh Waktu

Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan, analisis kebijakan, dan pelayanan administrasi strategis yang menjadi fungsi utama Sekretariat Daerah.

#### 4) Pangkat dan Golongan

Struktur pangkat PNS didominasi oleh:

- **Golongan III (III/a–III/d)** sebagai mayoritas
- Golongan IV masih terbatas

Tabel III.15

Jumlah Pegawai PNS Sekretariat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOL. RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1	-	1
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	2
3	Pembina Tingkat I	IV/b	3	3	6
4	Pembina	IV/a	3	4	7
5	Penata Tingkat I	III/d	8	3	11
6	Penata	III/c	3	3	6
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	4	2	6
8	Penata Muda	III/a	20	15	35
9	Pengatur Tingkat I	II/d	1	4	5
10	Pengatur	II/c	6	1	7
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-
12	Pengatur Muda	II/a	1	-	1
13	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-
14	Juru	I/c	-	-	-
15	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-
16	Juru Muda	I/a	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>51</b>	<b>35</b>	<b>86</b>

Tabel III.16

Jumlah Pegawai PPPK Sekretariat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT PPPK	GOL. RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1		IX	4	5	9
2		VII	2	-	2
3		V	2	3	5
4		III	1	-	1
Jumlah			9	8	17

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa Kader pimpinan tingkat menengah relatif tersedia. Namun, keberlanjutan kepemimpinan senior berpotensi terganggu jika tidak diikuti percepatan pengembangan karier.

## 5) Struktur Usia Pegawai

Usia Pegawai ASN Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.17

Jumlah Pegawai ASN Sekretariat Daerah berdasarkan Usia

KATEGORI USIA	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU
Usia < 30 Tahun	7	4	23
Usia 30 - 39 Tahun	10	11	44
Usi 40-45 Tahun	46	2	25
Usia > 50 Tahun	23	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	<b>17</b>	<b>94</b>

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa distribusi usia ASN di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- Mayoritas PNS berusia **di atas 40 tahun**
- Pegawai usia >50 tahun cukup signifikan
- Sementara itu, PPPK didominasi usia produktif (<40 tahun).

## 7. Analisa Program dan Kegiatan dalam pencapaian kinerja

Analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja utama yang didukung oleh program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja tersebut mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah dalam rangka mewujudkan sasaran strategis organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel III.18  
Keterkaitan Program Kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (outcome)/Sub Kegiatan (output)	satuan	Target Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja	Keterangan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score IKM
		Persentase Tata Kelola Keuangan Yang Terlaksana	%	100	104,09	Mendukung indikator sasaran Score SAKIP
		Persentase Kebijakan di bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Serta Bidang Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana	%	100	104,17	Mendukung indikator sasaran Score SAKIP
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score IKM
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prosentase tata kelola perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score SAKIP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	11	11	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	%	100	108,18	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.540	1.792	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	14	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	102	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	200	204	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	%	100	100	Mendukung indikator sasaran Score IKM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	32	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150	150	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perangkat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan layanan umum kantor	Laporan	12	12	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	89	89	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6	
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score SAKIP</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	28	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	28	28	
	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score IKM</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang Disediakan	Paket	12	12	
	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Presentase Fasilitas dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi</b>	%	<b>100</b>	<b>104,17</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score SAKIP</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	39	39	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	6	6	

	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8	9	
	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score IKM</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	240	240	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	240	240	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	240	240	
2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan, bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi yang Terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>97,07</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score LPPD</b>
		<b>Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>132,73</b>	
		<b>Persentase dibidang Bina Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>105,56</b>	
	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan</b>	%	<b>100</b>	<b>95,45</b>	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	12	12	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	22	19	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	17	17	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra</b>	%	<b>100</b>	<b>105,56</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	Dokumen	150	175	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa	Dokumen	175	175	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	80	80	
	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum</b>	%	<b>100</b>	<b>97,07</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	7	7	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	umlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	4	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	777	864	
	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama</b>	%	<b>100</b>	<b>170</b>	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Dokumen	10	17	
3	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Kebijakan dibidang Penyusunan Program, Pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>119,05</b>	<b>Mendukung indikator sasaran Score Tata Kelola PBJ</b>
		<b>Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>110,71</b>	
		<b>Persentase Kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana</b>	%	<b>100</b>	<b>259,84</b>	
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian</b>	%	<b>100</b>	<b>121,42</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	25	25	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	35	50	
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan</b>	%	<b>100</b>	<b>119,05</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	7	11	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	12	

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	12
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa</b>	%	<b>100</b>	<b>259,84</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	110	74
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	24	117
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	400	899
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	12	12
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	12	12

Dari tabel diatas dapat dianalisa dukungan program kegiatan terhadap pencapaian in dikator sasaran pada Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan konsisten di berbagai indikator utama, antara lain:

- 1) Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi tercapai 100%, mendukung indikator sasaran Score Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- 2) Tata kelola keuangan dan kelembagaan memperoleh capaian melebihi target, masing-masing 104,09% dan 104,17%, yang menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan organisasi.
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar Sekretariat Daerah dan administrasi keuangan serta kepegawaian juga mencapai 100% atau lebih, yang menandakan optimalisasi pelayanan internal.
- 4) Pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN melampaui target dengan realisasi 1.792 orang dari target 1.540, menunjukkan penyerapan sumber daya manusia yang maksimal.
- 5) Berbagai administrasi pendukung seperti pengelolaan peralatan kantor, pemeliharaan barang milik daerah, dan penataan organisasi menunjukkan capaian optimal, sebagian bahkan melebihi target, misalnya penataan organisasi dengan capaian 104,17%.

Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator sasaran Score SAKIP dan Score IKM, menandakan pengelolaan tata kelola perangkat daerah yang efisien dan efektif.

#### **b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Program ini menunjukkan capaian positif dengan beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1) Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi, dan informasi mencapai 97,07%, sedikit di bawah target, namun tetap mendukung Score Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

- 2) Kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama daerah melampaui target dengan capaian 132,73%.
- 3) Bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat mencapai 105,56%, memperlihatkan penguatan program kesejahteraan yang efektif.
- 4) Dokumen fasilitasi dan koordinasi di berbagai bidang administrasi serta pelaksanaan otonomi daerah hampir seluruhnya terealisasi sesuai target, mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
- 5) Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum bahkan melampaui target dengan realisasi 864 dokumen dari target 777 dokumen, menunjukkan capaian yang sangat baik dalam tata kelola hukum daerah.

Realisasi kegiatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **c. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini menunjukkan capaian luar biasa pada berbagai indikator utama, khususnya dalam bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa serta pembangunan ekonomi:

- 1) Persentase pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian, dan evaluasi pelaporan pembangunan mencapai 119,05%.
- 2) Kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam mencapai 110,71%, menunjukkan upaya optimalisasi pengelolaan SDA.

- 3) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa mencatat capaian sangat tinggi, 259,84%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pengadaan dan layanan elektronik.
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bidang perekonomian mencapai 121,42%, serta peningkatan dokumentasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa secara substansial dengan jumlah peserta advokasi hampir dua kali lipat dari target.
- 5) Pemantauan kebijakan sumber daya alam dan koordinasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, serta pertambangan mencapai 100%, mencerminkan komitmen penuh terhadap pengelolaan berkelanjutan.

Hasil ini menunjukkan bahwa program perekonomian dan pembangunan berhasil memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah.

Capaian kinerja seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 secara keseluruhan sangat memuaskan dengan sebagian besar indikator utama tercapai bahkan melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program secara efektif dan efisien, sinergi antar bidang urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rekomendasi untuk penguatan selanjutnya adalah memperhatikan indikator yang belum mencapai target 100%, serta meningkatkan kapasitas sumber daya dan sistem

pengendalian internal guna menjaga dan meningkatkan keberlanjutan capaian kinerja.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia yang berdaya guna dan juga dana (anggaran) yang tersedia.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut pada alokasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan telah ditetapkan anggaran sebesar Rp 33.755.180.503 ,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 31.233.826.768,00 atau 92,55%.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) program yang meliputi 18 (delapan belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada 9 (sembilan) bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.19  
Anggaran dan Realisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Prosentase
1	2	3	4	5	6
<b>4.01.4.05.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp26.947.471.155,00</b>	<b>Rp25.725.507.193,34</b>	<b>Rp1.221.963.961,66</b>	95,47%
<b>4.01.4.0.1..01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp170.494.604,00</b>	<b>Rp169.786.681,005</b>	<b>Rp707.923,00</b>	99,58%
4.01.4.0.1..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp170.494.604,00	Rp169.786.681,005	Rp707.923,00	99,58%
<b>4.01.4.0.1..01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp12.453.172.269,00</b>	<b>Rp11.864.289.749,00</b>	<b>Rp588.882.520,00</b>	95,27%
4.01.4.0.1..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.346.292.466,00	Rp10.789.667.578,00	Rp556.624.888,00	95,09%
4.01.4.0.1..01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp1.106.879.803,00	Rp1.074.622.171,00	Rp32.257.632,00	97,09%
<b>4.01.4.0.1..01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp110.809.808,00</b>	<b>Rp110.376.372,00</b>	<b>Rp433.436,00</b>	<b>99,61%</b>
4.01.4.0.1..01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp110.809.808,00	Rp110.376.372,00	Rp433.436,00	99,61%
<b>4.01.4.0.1..01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp4.014.784.319,00</b>	<b>Rp3.945.905.930,00</b>	<b>Rp68.878.389,00</b>	<b>98,28%</b>
4.01.4.0.1..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.119.314.865,00	Rp1.097.823.527,00	Rp21.491.338,00	98,08%
4.01.4.0.1..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp452.157.852,00	Rp450.163.675,00	Rp1.994.177,00	99,56%
4.01.4.0.1..01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp1.119.934.000,00	Rp1.084.176.651,00	Rp35.757.349,00	96,81%
4.01.4.0.1..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.323.377.602,00	Rp1.313.742.077,00	Rp9.635.525,00	99,27%
<b>4.01.4.0.1..01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp1.097.112.908,00</b>	<b>Rp1.094.515.496,00</b>	<b>Rp2.597.412,00</b>	<b>99,76%</b>
4.01.4.0.1..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.097.112.908,00	Rp1.094.515.496,00	Rp2.597.412,00	99,76%
<b>4.01.4.0.1..01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp1.465.328.508,00</b>	<b>Rp1.419.216.377,00</b>	<b>Rp46.112.131,00</b>	<b>96,85%</b>
4.01.4.0.1..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp988.650.093,00	Rp955.955.736,00	Rp32.694.357,00	96,69%

4.01.4..0.1..01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp185.955.986,00	Rp185.744.570,00	Rp211.416,00	99,89%
4.01.4..0.1..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp290.722.429,00	Rp277.516.071,00	Rp13.206.358,00	95,46%
<b>4.01.4..0.1..01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Rp2.103.575.625,00</b>	<b>Rp1.761.281.284,00</b>	<b>Rp342.294.341,00</b>	<b>83,73%</b>
4.01.4..0.1..01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp1.503.575.625,00	Rp1.161.281.284,00	Rp342.294.341,00	77,23%
4.01.4..0.1..01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	100,00%
<b>4.01.4..0.1..01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</b>	<b>Rp3.686.239.724,00</b>	<b>Rp3.545.913.832,34</b>	<b>Rp140.325.891,66</b>	<b>96,19%</b>
4.01.4..0.1..01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp2.448.630.030,00	Rp2.348.556.223,34	Rp100.073.806,66	95,91%
4.01.4..0.1..01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp1.045.814.829,00	Rp1.005.845.287,00	Rp39.969.542,00	96,18%
4.01.4..0.1..01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Rp191.794.865,00	Rp191.512.322,00	Rp282.543,00	99,85%
<b>4.01.4..0.1..01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Rp521.228.458,00</b>	<b>Rp499.145.995,00</b>	<b>Rp22.082.463,00</b>	<b>95,76%</b>
4.01.4..0.1..01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp176.323.000,00	Rp165.661.676,00	Rp10.661.324,00	93,95%
4.01.4..0.1..01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp200.073.438,00	Rp191.114.553,00	Rp8.958.885,00	95,52%
4.01.4..0.1..01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp144.832.020,00	Rp142.369.766,00	Rp2.462.254,00	98,30%
<b>4.01.4..0.1..01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Rp1.324.724.932,00</b>	<b>Rp1.315.075.477,00</b>	<b>Rp9.649.455,00</b>	<b>99,27%</b>
4.01.4..0.1..01.2.14.01	Fasilitas Keprotokol	Rp830.562.387,00	Rp828.777.667,00	Rp1.784.720,00	99,79%
4.01.4..0.1..01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Rp172.315.305,00	Rp165.333.483,00	Rp6.981.822,00	95,95%
4.01.4..0.1..01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp321.847.240,00	Rp320.964.327,00	Rp882.913,00	100,00%
<b>4.01.4.05.04.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Rp4.839.652.208,00</b>	<b>Rp3.716.028.391,00</b>	<b>Rp1.123.623.817,00</b>	<b>76,78%</b>
<b>4.01.4..0.1..02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Rp574.803.574,00</b>	<b>Rp573.721.290,00</b>	<b>Rp1.082.284,00</b>	<b>99,81%</b>
4.01.4..0.1..02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp98.186.122,00	Rp97.988.965,00	Rp197.157,00	99,80%
4.01.4..0.1..02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp279.066.562,00	Rp278.422.173,00	Rp644.389,00	99,77%
4.01.4..0.1..02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp197.550.890,00	Rp197.310.152,00	Rp240.738,00	99,88%

<b>4.01.4..0.1..02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp3.643.451.444,00</b>	<b>Rp2.551.059.530,00</b>	<b>Rp1.092.391.914,00</b>	<b>70,02%</b>
4.01.4..0.1..02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp3.166.554.206,00	Rp2.203.266.719,00	Rp963.287.487,00	69,58%
4.01.4..0.1..02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp47.694.362,00	Rp29.642.374,00	Rp18.051.988,00	62,15%
4.01.4..0.1..02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp429.202.876,00	Rp318.150.437,00	Rp111.052.439,00	74,13%
<b>4.01.4..0.1..02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Rp522.802.748,00</b>	<b>Rp492.760.402,00</b>	<b>Rp30.042.346,00</b>	<b>94,25%</b>
4.01.4..0.1..02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp232.441.562,00	Rp222.816.250,00	Rp9.625.312,00	95,86%
4.01.4..0.1..02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp159.154.480,00	Rp143.892.015,00	Rp15.262.465,00	90,41%
4.01.4..0.1..02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp131.206.706,00	Rp126.052.137,00	Rp5.154.569,00	96,07%
<b>4.01.4..0.1..02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Rp98.594.442,00</b>	<b>Rp98.487.169,00</b>	<b>Rp107.273,00</b>	<b>99,89%</b>
4.01.4..0.1..02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp98.594.442,00	Rp98.487.169,00	Rp107.273,00	99,89%
<b>4.01.4.05.04.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp1.968.057.140,00</b>	<b>Rp1.792.291.184,00</b>	<b>Rp175.765.956,00</b>	<b>91,07%</b>
<b>4.01.4..0.1..03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Rp297.192.736,00</b>	<b>Rp286.108.667,00</b>	<b>Rp11.084.069,00</b>	<b>96,27%</b>
4.01.4..0.1..03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp106.039.654,00	Rp99.254.755,00	Rp6.784.899,00	93,60%
4.01.4..0.1..03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rp191.153.082,00	Rp186.853.912,00	Rp4.299.170,00	97,75%
<b>4.01.4..0.1..03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp480.323.482,00</b>	<b>Rp455.565.612,00</b>	<b>Rp24.757.870,00</b>	<b>94,85%</b>
4.01.4..0.1..03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp246.138.586,00	Rp237.683.909,00	Rp8.454.677,00	96,57%
4.01.4..0.1..03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp135.408.857,00	Rp127.069.820,00	Rp8.339.037,00	93,84%
4.01.4..0.1..03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp98.776.039,00	Rp90.811.883,00	Rp7.964.156,00	91,94%
<b>4.01.4..0.1..03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp686.296.321,00</b>	<b>Rp661.919.057,00</b>	<b>Rp24.377.264,00</b>	<b>96,45%</b>
4.01.4..0.1..03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp281.087.511,00	Rp271.138.917,00	Rp9.948.594,00	96,46%

4.01.4..0.1..03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp152.421.515,00	Rp146.139.170,00	Rp6.282.345,00	95,88%
4.01.4..0.1..03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp252.787.295,00	Rp244.640.970,00	Rp8.146.325,00	96,78%
<b>4.01.4..0.1..03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp504.244.601,00</b>	<b>Rp388.697.848,00</b>	<b>Rp115.546.753,00</b>	<b>77,09%</b>
4.01.4..0.1..03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp450.000.000,00	Rp342.895.724,00	Rp107.104.276,00	76,20%
4.01.4..0.1..03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp54.244.601,00	Rp45.802.124,00	Rp8.442.477,00	84,44%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp33.755.180.503,00</b>	<b>Rp31.233.826.768,34</b>	<b>Rp2.521.353.734,66</b>	<b>92,53%</b>

Berdasarkan data diatas dapat di jelaskan bahwa secara umum kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran mencapai 92,53%.

### C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BERDASAR RENCANA AKSI TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini diukur capaian target sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Sasaran Rencana Strategis sesuai Rencana Aksi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator : 1) Score Nilai LPPD direncanakan 3,3000 pada tribulan 2 dapat tercapai pada nilai 3,3487. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten dengan indikator : 1) Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten direncanakan pada Tribulan I dapat tercapai sesuai dengan Rencana Aksi, 2) Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah

---

Kabupaten Pacitan direncanakan BB pada Tribulan II dapat tercapai sesuai dengan Rencana Aksi.

2. Meningkatkan pengelolaan kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dengan 1 (satu) indikator Nilai LPPD direncanakan Nilai Baik pada Tribulan II dapat dicapai sesuai rencana aksi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai IKM Baik pada Tribulan ke IV dapat dicapai dengan nilai Sangat Baik, melebihi rencana aksi.
4. Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi dengan indikator % Bagian dengan rata-rata capaian program baik pada Triwulan ke IV dapat tercapai sesuai rencana aksi.
5. Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Hasil Survey IKM pada Tribulan ke IV dapat tercapai sesuai rencana aksi.
6. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah serta terwujudnya masyarakat yang paham, sadar dan taat hukum % produk hukum yang sesuai dengan ketentuan pada Tribulan ke IV dapat tercapai sesuai rencana aksi.

Untuk lebih jelasnya, pengukuran target rencana aksi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.19  
Capaian Target Indikator Sasaran Rencana Aksi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				REALISASI				KETERANGAN	
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	URAIAN	INDIKATOR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	-	3,3000	-	-	-	3,3487	-	-	
		1.2	Score Nilai Tata Kelola PBJ	-	-	-	85	-	-	-	82,83	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	2.1	Score Nilai SAKIP PD	-	80	-	-	-	71,85	-	-	
		2.1	Score Nilai IKM PD	-	-	-	90	-	-	-	88,37	

Tabel III.20  
Capaian Target Indikator Program Kegiatan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)	
							I		II		III		IV			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dan Pemkab	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tata kelola keuangan yang terlaksana	%	100.00	26.947.471.155,00	26,77	5.103.391.645,00	23,21	6.155.306.832,00	26,77	5.981.612.515,00	27,34	8.485.196.201,34	104,09	25.725.507.193,34
			Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	%	100.00		20,69		24,99		24,99		29,33		100	

		Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	%	100.00		23,29		16,98		32,91		30,99		104,17	
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar sekretariat daerah	%	100.00		33,34		25		13,89		27,77		100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencanaan PD	%	100.00	170.494.604,00	27,27	16.144.000,00	18,18	45.181.421,00	27,27	53.764.000,00	27,28	54.697.260,00	100	169.786.681,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11.00	170.494.604,00	3	16.144.000,00	2	45.181.421,00	3	53.764.000,00	3	54.697.260,00	11	169.786.681,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	%	100.00	12.453.172.269,00	26,76	2.758.754.071,00	23,19	3.267.709.473,00	26,76	2.893.417.600,00	31,47	2.944.408.605,00	108,18	11.864.289.749,00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	1540.00	11.346.292.466,00	384	2.527.318.458,00	512	3.022.451.636,00	512	2.661.969.332,00	384	2.577.928.152,00	1.792,00	10.789.667.578,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	1.106.879.803,00	4	231.435.613,00	3	245.257.837,00	4	231.448.268,00	3	366.480.453,00	14	1.074.622.171,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian PD	%	100.00	110.809.808,00	21,5	35.899.100,00	27,33	20.842.110,00	26	19.084.662,00	27,17	34.550.500,00	102	110.376.372,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	200	110.809.808,00	43	35.899.100,00	50	20.842.110,00	52	19.084.662,00	59	34.550.500,00	204	110.376.372,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PD	%	100.00	4.014.784.319,00	27	758.111.054,00	24,91	883.945.140,00	24,51	860.036.811,00	23,58	1.443.812.925,00	100	3.945.905.930,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	1.119.314.865,00	9	278.712.000,00	8	265.667.881,00	8	149.708.350,00	5	403.735.296,00	30	1.097.823.527,00

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	452.157.852,00	6	28.022.000,00	9	3.270.000,00	9	142.722.483,00	8	276.149.192,00	32	450.163.675,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150.00	1.119.934.000,00	37	29.332.250,00	37	235.180.482,00	37	358.074.462,00	39	461.589.457,00	150	1.084.176.651,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	1.323.377.602,00	4	422.044.804,00	3	379.826.777,00	2	209.531.516,00	3	302.338.980,00	12	1.313.742.077,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PD	%	100.00	1.097.112.908,00	24,99	194.693.070,00	25	224.653.599,00	25	228.813.665,00	25,01	446.355.162,00	100	1.094.515.496,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	1.097.112.908,00	3	194.693.070,00	3	224.653.599,00	3	228.813.665,00	3	446.355.162,00	12	1.094.515.496,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD	%	100.00	1.465.328.508,00	21,97	273.548.035,00	36,38	284.062.320,00	21,79	249.535.420,00	19,86	612.070.602,00	100	1.419.216.377,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	89	988.650.093,00	19	246.908.035,00	20	123.206.967,00	22	151.615.695,00	28	434.225.039,00	89	955.955.736,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50.00	185.955.986,00	12	26.640.000,00	10	52.972.790,00	12	27.429.450,00	16	78.702.330,00	50	185.744.570,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6.00	290.722.429,00	1	0	4	107.882.563,00	1	70.490.275,00	0	99.143.233,00	6	277.516.071,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH	%	100.00	2.103.575.625,00	26,79	168.456.395,00	23,21	271.456.395,00	26,78	200.368.722,00	23,22	1.120.999.772,00	100	1.761.281.284,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bulan	28.00	1.503.575.625,00	8	47.456.395,00	6	47.456.395,00	7	35.968.722,00	7	1.030.399.772,00	28	1.161.281.284,00

	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bulan	28.00	600.000.000,00	7	121.000.000,00	7	224.000.000,00	8	164.400.000,00	6	90.600.000,00	28	600.000.000,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda	%	100.00	3.686.239.724,00	33,34	608.580.644,00	25	846.118.453,00	13,89	1.096.877.267,00	27,77	994.337.468,34	100	3.545.913.832,34
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	2.448.630.030,00	4	469.674.644,00	4	582.766.248,00	1	659.831.625,00	3	636.283.706,34	12	2.348.556.223,34
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.045.814.829,00	6	110.225.500,00	3	225.953.771,00	0	383.683.496,00	3	285.982.520,00	12	1.005.845.287,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	191.794.865,00	2	28.680.500,00	2	37.398.434,00	4	53.362.146,00	4	72.071.242,00	12	191.512.322,00

	Penataan Organisasi	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi	%	100.00	521.228.458,00	23,29	24.479.247,00	16,98	45.646.860,00	32,91	80.524.926,00	30,99	348.494.962,00	104,17	499.145.995,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	39.00	176.323.000,00	11	8.250.000,00	15	3.850.000,00	6	14.062.099,00	7	139.499.577,00	39	165.661.676,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	6.00	200.073.438,00	1	5.460.500,00	0	19.303.917,00	2	25.094.484,00	3	141.255.652,00	6	191.114.553,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	8.00	144.832.020,00	2	10.768.747,00	1	22.492.943,00	4	41.368.343,00	2	67.739.733,00	9	142.369.766,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100.00	1.324.724.932,00	20,69	264.726.029,00	24,99	265.691.061,00	24,99	299.189.442,00	29,33	485.468.945,00	100	1.315.075.477,00
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	240	830.562.387,00	52	113.572.768,00	60	190.480.206,00	60	206.187.000,00	68	318.537.693,00	240	828.777.667,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	240	172.315.305,00	48	50.384.018,00	60	37.926.455,00	60	24.667.440,00	72	52.355.570,00	240	165.333.483,00

		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	240	321.847.240,00	49	100.769.243,00	60	37.284.400,00	60	68.335.002,00	71	114.575.682,00	240	320.964.327,00
2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana	%	100.00	4.839.652.208,00	54,58	820.524.273,00	29,39	575.495.811,00	24,39	1.391.507.236,00	24,37	928.501.071,00	132,73	3.716.028.391,00
			Persentase kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	%	100.00		22,94		34,38		33,99		14,25		105,56	
			Persentase kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	%	100.00		28,94		15,96		30,43		21,74		97,07	

	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan	%	100.00	574.803.574,00	39,17	117.437.353,00	18,75	135.302.847,00	18,75	149.525.397,00	18,78	171.455.693,00	95,45	573.721.290,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	12.00	98.186.122,00	3	26.429.000,00	3	1.986.290,00	3	39.040.463,00	3	30.533.212,00	12	97.988.965,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	22.00	279.066.562,00	10	58.773.353,00	3	55.638.757,00	3	72.568.576,00	3	91.441.487,00	19	278.422.173,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	17.00	197.550.890,00	8	32.235.000,00	3	77.677.800,00	3	37.916.358,00	3	49.480.994,00	17	197.310.152,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra	%	100.00	3.643.451.444,00	22,94	503.426.570,00	34,38	337.632.18,00	33,99	1.088.400.839,00	14,25	621.600.003,00	105,56	2.551.059.530,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua	Dokumen	150	3.166.554.206,00	56	355.684.300,00	62	306.235.929,00	18	970.305.600,00	39	571.040.890,00	175	2.203.266.719,00



		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa	Doku men	175.00	47.694.36 2,00	7	419.250,0 0	71	8.100.000 ,00	94	6.566.500 ,00	3	14.556.62 4,00	175	29.642.374,0 0
--	--	---	--	-------------	--------	-------------------	---	----------------	----	------------------	----	------------------	---	-------------------	-----	-------------------

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	80	429.202.876,00	22	147.323.020,00	17	23.296.189,00	29	111.528.739,00	12	36.002.489,00	80	318.150.437,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum	%	100,00	522.802.748,00	28,94	176.192.850,00	15,96	89.193.600,00	30,43	121.658.500,00	21,74	105.715.452,00	97,07	492.760.402,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	7,00	232.441.562,00	1	81.601.850,00	2	54.909.900,00	3	48.904.500,00	1	37.400.000,00	7	222.816.250,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5,00	159.154.480,00	2	60.711.000,00	0	14.772.400,00	1	22.114.515,00	1	46.294.100,00	4	143.892.015,00

		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	777.00	131.206.706,00	253	33.880.000,00	150	19.511.300,00	221	50.639.485,00	240	22.021.352,00	864	126.052.137,00
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama	%	100.00	98.594.442,00	70	23.467.500,00	40	13.367.246,00	30	31.922.500,00	30	29.729.923,00	170	98.487.169,00
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10.00	98.594.442,00	7	23.467.500,00	4	13.367.246,00	3	31.922.500,00	3	29.729.923,00	17	98.487.169,00
3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana	%	100.00	1.968.057.140,00	19,36	174.431.407,00	26,78	264.520.551,00	30,36	549.526.836,00	34,21	803.812.390,00	110,71	1.792.291.184,00

		Persentase kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	%	100.00		63,57		74,49		63,04		58,74		259,84	
		Persentase kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	%	100.00		21,44		45,24		26,2		26,17		119,05	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian	%	100.00	297.192.736,00	13,72	52.323.290,00	28,57	61.813.215,00	35,71	58.631.525,00	43,42	113.340.637,00	121,42	286.108.667,00

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	25.00	106.039.654,00	4	10.258.800,00	5	28.414.310,00	5	16.003.025,00	11	44.578.620,00	25	99.254.755,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	35.00	191.153.082,00	4	42.064.490,00	13	33.398.905,00	18	42.628.500,00	15	68.762.017,00	50	186.853.912,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan	%	100.00	480.323.482,00	21,44	25.130.704,00	45,24	126.952.397,00	26,2	150.994.115,00	26,17	152.488.396,00	119,05	455.565.612,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	7.00	246.138.586,00	1	21.158.704,00	6	103.288.566,00	2	43.661.191,00	2	69.575.448,00	11	237.683.909,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12.00	135.408.857,00	3	3.972.000,00	3	17.404.350,00	3	55.751.624,00	3	49.941.846,00	12	127.069.820,00



	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12.00	98.776.039,00	3	0	3	6.259.481,00	3	51.581.300,00	3	32.971.102,00	12	90.811.883,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa	%	100.00	686.296.321,00	63,57	64.669.948,00	74,49	46.203.281,00	63,31	166.737.890,00	58,47	384.307.938,00	259,84	661.919.057,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	110.00	281.087.511,00	14	14.358.999,00	27	11.243.570,00	17	85.334.800,00	16	160.201.548,00	74	271.138.917,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	24.00	152.421.515,00	36	2.668.742,00	40	2.738.876,00	24	58.927.586,00	17	81.803.966,00	117	146.139.170,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	400.00	252.787.295,00	112	47.642.207,00	129	32.220.835,00	298	22.475.504,00	360	142.302.424,00	899	244.640.970,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA	%	100.00	504.244.601,00	24,99	32.307.465,00	24,99	29.551.658,00	24,99	173.163.306,00	25,03	153.675.419,00	100	388.697.848,00



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	12.00	450.000.000,00	3	27.068.991,00	3	20.949.000,00	3	157.187.14,00	3	137.690.619,00	12	342.895.724,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	12.00	54.244.601,00	3	5.238.474,00	3	8.602.658,00	3	15.976.192,00	3	15.984.800,00	12	45.802.124,00

#### **D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 ini di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa bagian bisa mempengaruhi capaian kerjanya.
2. Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
3. Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang lengkap dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.
5. Penyampaian data yang tidak tepat waktu dan dianggap sebelah mata oleh bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sehingga berpengaruh pada target waktu yang telah ditentukan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana terus dilakukan sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dan mutasi pejabat dan staf merupakan salah satu upaya pemecahan yang dilakukan, penambahan sarana dan prasarana baik melalui pengadaan maupun rehabilitasi (pemeliharaan)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan mutasi pejabat dan staf, penerimaan CPNSD dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan juga dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah.
3. Selalu meningkatkan upaya-upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak terkait diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja baik dengan Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal, Kunjungan Kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ke Perangkat Daerah (PD) dalam rangka koordinasi dan pembinaan, membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan sehingga lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
5. Perlu prioritas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
6. Perlu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan akuntabel.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul sehingga capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan uraian tentang capaian indikator sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel.

Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik. Dengan melaksanakan 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) program 18 (delapan belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada tahun 2025, capaian indikator kinerja sasaran rata-rata yang merupakan capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebesar 95,35% dengan kategori Sangat Baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Namun dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul sehingga capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.



---

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## LAMPIRAN

6. Score Nilai LPPD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.2.7-739 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
34.	Kabupaten Barito Kuala	3,3737	Sedang
35.	Kabupaten Boyolali	3,3730	Sedang
36.	Kabupaten Lamongan	3,3693	Sedang
37.	Kabupaten Lombok Utara	3,3556	Sedang
38.	Kabupaten Pacitan	3,3487	Sedang
39.	Kabupaten Bintan	3,3420	Sedang
40.	Kabupaten Kudus	3,3402	Sedang

7. Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2025

### Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Pacitan Tahun 2025



---

## 8. Score Nilai SAKIP PD berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “AKIP” Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, Nomor 700.1.2.1/LHE-01/408.49/2025

### C. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **71,85** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.

Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat mendukung terlaksananya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya hasil evaluasi atas akuntabilitas instansi pemerintah ini dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian hasil evaluasi disampaikan untuk menjadi perhatian dan menindaklanjuti rekomendasi disertai bukti dukung sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya laporan ini.



INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
MAHMUD, S.Pd., M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 198901 1 002

## **9. Score Nilai IKM PD berdasarkan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Periode 1 Juli s.d 28 November 2025**

### **BAB V KESIMPULAN**

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat periode 1 Juli s/d 28 November 2025, dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM 88,37;
2. Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Penyelesaian, Kesesuaian Pelayanan serta kemudahan prosedur pelayanan.

Pacitan, 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN



**HERU WIWOHO S.P.**

## **10. Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dari Aplikasi Simolek**









No	Kode	Uraian/Indikator Utama/Prinsip/Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan/Output/Keluaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output/Keluaran	Target RPJMD pada Tahun 2024 (Pencapaian RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD di Kabupaten Pacitan (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun Berjalan yang Telah Dibekukan (2024) yang Ditentukan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Dibekukan (Tahun 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD di Tahun 2024 (T)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2024 + 2023 (Tahun Pelaksanaan RPJMD)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD di Tahun 2024 (T)		Peningkat Daya Prinsip/Output		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		K	Rp
011	021	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
												Realisasi Kinerja (Rp)		Anggar. Target		Anggar. Target								
												Realisasi Anggaran (Rp)		Anggar. Target		Anggar. Target								
												Realisasi Kinerja (Rp)		Anggar. Target		Anggar. Target								
												Realisasi Anggaran (Rp)		Anggar. Target		Anggar. Target								
												Total		11.751.000.000,00		11.751.000.000,00								
												Persentase Realisasi Anggaran												82,53%
												Prestasi												Anggar. Target

Faktor pendukung keberhasilan kinerja: Alat teknologi informasi yang memadai dan baik yang optimal

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Perencanaan dan pelaksanaan yang kurang baik sehingga pencapaian kinerja belum optimal. Keterbatasan anggaran yang ada dan belum termanajemen secara maksimal untuk capaian kinerja.

Tingkat keberlanjutan: Berkelanjutan karena terencana, terencana, terencana dan terencana. Realisasi anggaran yang ada dan terencana. Realisasi anggaran yang ada dan terencana. Realisasi anggaran yang ada dan terencana.

Tingkat keberlanjutan: Berkelanjutan karena terencana, terencana, terencana dan terencana. Realisasi anggaran yang ada dan terencana. Realisasi anggaran yang ada dan terencana. Realisasi anggaran yang ada dan terencana.

Pacitan, 26 Januari 2026  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**

**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196707161992021002**